ABSTRACT

POLITICAL PRAGMATISM DISCOURSE IN THE NEWS TEXT ABOUT ABRAHAM SAMAD*'S VIOLATIONS OF THE ETHICS CODE ON THE* HARIAN PIKIRAN RAKYAT

(Teun A. Van Dijk *Critical Discourse Analysis about Political Pragmatism Discourse in the News Text About* Abraham Samad *Violations of the Ethics Code on the* Harian Pikiran Rakyat *January 23rd 2015*)

Written by:
PANJI BANIDIA PRATAMA
NIM. 41811110
This thesis is under guidance of:
Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom.

The purpose of this research is to discover the Political Pragmatism Discourse in the news text about Abraham Samad *violations of the ethics code on the* Harian Pikiran Rakyat. *To achieve that goal then raised the question of how the dimension of text, dimension of social cognition, and dimension of social context in this news text. This research used a qualitative approach with* Teun A. Van Dijk *critical discourse analysis. The data collection technique for this research was using documentation study, in-depth interview, the study of literature and online data retrieval.*

Result of the study, the dimension of text indicates that the news text about Abraham Samad *violations of the ethics code which carrying* Hasto Krisyanto*'s theme statement when it is not well-founded nor do they have strong evidence and that tend to be things that are not possible. Social cognition, text of this news is inseparable from social cognition journalist themselves who see* Abraham Samad*'s case is merely an attempt to criminalize mad to* KPK. *While the social context, the discourse developed in the community when it is leading to a consensus that* KPK *is in the right side, while the* Polri *in the wrong side, so that many people expressed their support by doing demonstration and others.*

The conclusion of this study shows that the news text has been marginalized political pragmatism discourse of Abraham Samad *with a discourse that says that* KPK *is criminalize victim of the other institutions who want to stunt* KPK. *Suggestions of researcher, the community is expected not to look at the news just as an informative or educative course, because in it, there are many ideological, political, and economic interest.*

Keywords: *Discourse, Political Pragmatism, News Text, Critical Discourse Analysis.*

WACANA PRAGMATISME POLITIK DALAM TEKS BERITA TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK ABRAHAM SAMAD DI HARIAN PIKIRAN RAKYAT

(Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Mengenai Wacana Pragmatisme Politik Dalam Teks Berita "Giliran PDIP Serang KPK" Tentang Pelanggaran Kode Etik Abraham Samad Di Harian Pikiran Rakyat Edisi 23 Januari 2015)

ARTIKEL

Pemberitaan pada praktiknya tidak bisa hanya dikatakan sebagai suatu produk dari media yang bersifat informatif ataupun netral, karena di dalamnya sangat sarat akan wacana – wacana sebagai buah dari kepentingan – kepentingan pihak – pihak tertentu, baik itu kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologi. Seperti halnya juga yang terjadi pada pemberitaan mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK non-aktif Abraham Samad saat menjelang pemilihan presiden 2014. Dimana pada saat itu posisi Abraham Samad masih menjadi Ketua KPK yang masih aktif, sehingga dikatakan bahwa Samad melakukan pelanggaran kode etik. Mencuatnya kasus tersebut sebagai dampak dari ditetapkannya Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam kasus pelanggaran kode etik Abraham Samad ini, media – media di Indonesia berlomba – lomba untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan kepentingan – kepentingan yang ingin dicapainya. Ekspresi media tersebut, baik secara disadari maupun tidak, telah membentuk suatu kesadaran ataupun kesepakatan publik yang mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat luas terhadap kasus ini. Misalnya saja kesepakatan publik yang menyatakan bahwa dalam kasus KPK dengan Polri ini, pihak yang salah adalah Polri dan KPK hanya

menjadi korban dari kekuatan lebih yang dimiliki Polri. Apalagi dalam kasus ini, Polri "didukung" oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan Jendral Pol. Sutarman. Dengan demikian, jelas sekali bahwa wacana seperti itulah yang diinginkan beredar di masyarakat untuk memenuhi kepentingan dari media itu sendiri maupun kepentingan lainnya.

Dengan adanya wacana bahwa KPK menjadi korban tadi, maka wacana lobi politik yang dilakukan oleh Abraham Samad untuk melanggengkan dirinya menjadi cawapres Joko Widodo pada pilpres 2014 tersebut, hanya dianggap sebagai suatu bentuk perlawanan yang dilakukan untuk memperlemah KPK. Bahkan dengan demikian, seperti terjadi suatu pembenaran bahwa lobi politik yang dilakukan oleh Abraham Samad kepada PDI Perjuangan itu merupakan suatu hal yang sah – sah saja.

Wacana mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Abraham Samad tersebut berawal dari pernyataan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang membeberkan bahwa Abraham Samad pernah rajin menemui petinggi partai sedikitnya enam kali pada kurun waktu Januari hingga Mei 2014 dalam konferensi pers pada tanggal 22 Januari 2015 lalu. Dalam konferensi persnya juga, Hasto "mengangkut" puluhan wartawan dengan dua bus besar ke apartemen mewah di The Capital Residence, Jakarta selatan yang mana digunakan sebanyak dua kali oleh Abraham Samad untuk menemui petinggi partai.

Berbicara mengenai kasus pertentangan antara kedua lembaga penegak hukum ini, sejatinya bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2010 lalu, sempat

menggemparkan ketika muncul kasus “Rekening Gendut Jendral Polri”. Sebagai lembaga pemberantasan korupsi, KPK mengusut kasus tersebut, sehingga kasus tersebut oleh media dilabeli sebagai “Cicak vs Buaya”. Dimana KPK sebagai lembaga yang lebih kecil dan mungkin lemah, dianalogikan sebagai cicak. Sementara Polri dengan kuasa yang lebih besar dianalogikan sebagai buaya yang siap memangsa lawannya.

Maka dari itu, untuk kasus KPK dengan Polri sekarang pun banyak media yang melabelinya sebagai Cicak vs Buaya Jilid III. Kasus ini bermula ketika Presiden Jokowi mengirimkan surat untuk mencalonkan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jendral Sutarman kepada DPR. Sementara itu, KPK yang dari sebelumnya telah memberikan rapor merah kepada Komjen Budi Gunawan karena terdapat transaksi yang mencurigakan saat Budi masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier PSDM Polri 2004 – 2006 tidak tinggal diam. Empat hari setelah Jokowi mengirimkan surat tersebut kepada DPR, atau tepatnya tanggal 13 Januari 2015, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tersebut membuat pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri ditunda terlebih dahulu oleh Jokowi. Untuk menempati kekosongan yang terjadi di kursi Kapolri karena Jendral Sutarman telah diberhentikan, Jokowi kemudian menunjuk Wakil Kapolri, Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri sementara. Dari situlah pergesekan antara KPK dengan Polri tidak dapat terelakkan lagi.

Kasus Cicak vs Buaya jilid III ini menjadi lebih menarik lagi ketika, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa terdapat wacana mengenai lobi politik yang dilakukan Abraham Samad kepada elit PDI Perjuangan agar dapat dijadikan cawapres pendamping Jokowi pada pilpres 2014 lalu. Tentunya akan menjadi sangat riskan ketika KPK, yang sangat didukung dan dipercayai oleh masyarakat jika dijadikan sebagai alat bermanuver dalam politik oleh Abraham Samad.

Jika seperti apa yang disebutkan oleh Hasto tadi, maka terlihat bahwa Abraham Samad sudah memanfaatkan segala kesempatan, kekuatam, juga posisi yang ia miliki untuk memenuhi kepentingannya dalam bidang politik. Abraham Samad pada lobi politik tersebut sudah mencerminkan bagaimana ia yang seharusnya menjadi penyidik juga pemberantas praktik – praktik korupsi, malah seperti tergiur oleh godaan untuk meraih tahta sebagai cawapres yang bersanding dengan Jokowi. Hal – hal tersebut sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan pragmatisme politik. Dimana pragmatisme politik ini mengagungkan manfaat yang dapat diterima dari tindakan – tindakan yang dilakukan seseorang, maupun kelompok.

Pragmatisme politik ini melanggengkan tiap – tiap individu untuk berpolitik berdasarkan kepentingan juga manfaat yang bisa dan akan diterimanya. Karena pada dasarnya dan secara sederhana, pragmatisme ini melihat bahwa suatu pemikiran dianggap benar ketika ia memiliki manfaat. Pragmatisme ini, ketika dibawa apalagi dalam ranah politik akan berbahaya. Karena nantinya, sangat besar kemungkinan akan terjadinya penghalalan segala cara agar dapat memenuhi kepentingan yang dimiliki juga bisa mendapatkan manfaat yang sebesar – besarnya

bagi diri sendiri tanpa memikirkan bagaimana dampak terhadap orang lain. Seperti halnya Abraham Samad yang pada saat menjelang pilpres 2014 tersebut masih menjabat sebagai Ketua KPK, melakukan lobi politik demi kepentingannya sendiri untuk menjadi cawapres dari Jokowi. Padahal institusi seperti KPK ini harusnya bebas dari kepentingan – kepentingan politik dan selalu mendahulukan kepentingan publik.

Abraham Samad yang dalam kasus ini banyak didukung oleh berbagai pihak, terutama oleh kebanyakan masyarakat yang memandang, ataupun dapat dikatakan terlanjur tidak suka terhadap Polri. Hal tersebut sebenarnya tidak bisa terlepas dari historis dari KPK itu sendiri. Lembaga yang menaungi Abraham Samad itu sendiri.

Sepak terjang KPK yang sedari awal memikat hampir semua masyarakat Indonesia telah membentuk suatu pemahaman di mata publik bahwa KPK adalah satu – satunya harapan yang dimiliki masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi yang sudah sejak lama melekat kepada Negara Indonesia ini. Sehingga bisa kita katakan juga bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia ini menilai KPK merupakan lembaga yang paling bersih dari tindak korupsi maupun bentuk tindak kejahatan lainnya.

Ketika pemberitaan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Abraham Samad sebagai ketua KPK saat itu, kebanyakan masyarakat menilai bahwa hal tersebut hanyalah pembalasan belaka yang dilakukan oleh PDIP, karena calon kapolri-nya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Sebenarnya penilaian seperti itu bisa dikatakan sah – sah saja jika kita melihat kasus – kasus perseteruan

antara KPK dengan Polri sebelumnya, dimana memang Polri pada saat itu terbukti bersalah.

Akan tetapi, tuduhan serius yang diutarakan oleh Hasto ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Dengan kapasitasnya sebagai Ketua KPK saat itu, Abraham Samad seharusnya tidak menyelewengkan wewenang yang ia punya.

Jika diruntut dari kasus perseteruan KPK dengan Polri sebelumnya, posisi masyarakat selalu menjadi pendukung KPK. Hal tersebut tidak terlepas dari citra polisi yang sudah terlanjur buruk di mata masyarakat Indonesia. Selain itu juga hal ini pun tidak terlepas pula dari manuver – manuver Polri yang selalu terkesan mengada – ngada ketika KPK berusaha menyentuh petinggi – petingginya yang melakukan tindak korupsi.

Dengan demikian, dalam masyarakat terus berkembang sehingga memunculkan suatu konsensus yang mengatakan bahwa KPK adalah pihak yang benar dan Polri adalah pihak yang salah. Yang pada akhirnya juga terbawa hingga kasus perseteruan KPK dengan Polri jilid tiga ini.

Dengan demikian pula, maka ketika Hasto mengungkapkan tentang lobi politik yang dilakukan oleh Abraham Samad, banyak masyarakat yang langsung menilai bahwa hal itu hanyalah mengada – ngada belaka. Bahkan tidak hanya masyarakat, media – media pun ikut terpengaruh akan konsensus publik pada berita yang mereka keluarkan mengenai kasus ini.

Banyak media termasuk juga Pikiran Rakyat yang kemudian mengeluarkan berita yang cenderung menyatakan “ketidak percayaannya” atas pernyataan yang

dikatakan oleh Hasto ini. Sehingga hal tersebut juga semakin meyakinkan publik akan konsensus yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian, wacana pragmatisme politik yang dilakukan oleh Abraham Samad semakin terpinggirkan oleh wacana yang berkembang di masyarakat yang menyatakan bahwa KPK adalah pihak yang selalu benar, dan pihak – pihak lain yang melakukan manuver kepada KPK adalah pihak yang salah.

Wacana pragmatisme politik Abraham Samad terkait dengan upaya pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden bersanding dengan Joko Widodo pada pilpres 2014 lalu seperti yang diutarakan Hasto Krisyanto pada konferensi pers yang ia lakukan Januari lalu sejatinya merupakan hal yang penting. Wacana ini tidak bisa kita anggap remeh, atau bahkan kita pandang hanya sebagai akal – akalan saja untuk "membalas" perlakuan KPK terhadap Polri.

Akan tetapi, wacana tersebut dikemas sedemikian rupa oleh media sehingga wacana tersebut tampak menjadi sah – sah saja. Sah – sah saja disini dalam artian bahwa masyarakat lebih menganggap bahwa wacana pragmatisme politik tersebut hanya sebuah "serangan" balasan yang dilakukan oleh pihak PDI Perjuangan terhadap KPK. Padahal jika dilihat dari konteks dimana Abraham Samad yang pada saat menjelang pilpres 2014 tersebut masih menjabat sebagai Ketua KPK, kemudian ia melakukan lobi politik demi kepentingannya sendiri untuk menjadi cawapres dari Jokowi, dimana seharusnya institusi seperti KPK ini harusnya bebas dari kepentingan – kepentingan politik.

Pada berita "Giliran PDIP Serang KPK" di Harian Pikiran Rakyat, wacana pragmatisme politik Abraham Samad ini dikesampingakan, dikalahkan dengan

wacana bahwa pernyataan Hasto tentang Abraham Samad tersebut hanyalah fitnah belaka. Hal itu dapat terlihat dari bagaimana Harian Pikiran Rakyat menyusun skema berita yang sedemikian rupa sehingga terlihat seperti itu. Struktur kebahasaan yang digunakan dalam berita tersebut dibuat lebih "mendukung" Abraham Samad. Seperti topik dari berita ini yang isinya "Serangan" atau pernyataan Hasto Kristiyanto, seorang politisi PDI Perjuangan terkait penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka merupakan pembalasan yang dilakukan oleh Ketua KPK (saat itu) Abraham Samad yang tidak jadi disandingkan dengan Joko Widodo pada pilpres 2014 lalu, tidak cukup beralasan juga tidak memiliki bukti yang kuat dan hal tersebut cenderung sebagai hal yang tidak mungkin.

Kemudian juga dapat terlihat pula dari skema penyusunan berita ini, dimana dari lead hingga summary, semuanya berujung kepada suatu kesimpulan dimana apa yang dikatakan Hasto tentang Abraham Samad dalam konferensi persnya itu merupakan hal yang tidak benar juga tidak didukung dengan bukti yang kuat. Selain itu juga dapat terlihat pula pada unsur mikro dari dimensi teks berita ini, dimana unsur – unsur tersebut mengarah pada keberpihakan teks berita ini kepada Abraham Samad.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa teks berita tentang pelanggaran kode etik oleh Abraham samad ini telah meminggirkan wacana pragmatisme politik Abraham Samad itu sendiri. Teks berita ini meminggirkan wacana pragmatisme politik tersebut dengan wacana yang mengatakan bahwa KPK merupakan korban kriminalisasi dari lembaga lainnya yang ingin mengkerdilkan

KPK supaya aksi korupsinya tidak terungkap oleh hukum, juga wacana dimana ketika Polri dengan KPK berseteru, maka pihak yang salah adalah Polri.

Untuk masyarakat, perlu dipahami bahwa dalam suatu berita, isinya tidak melulu hanya murni informasi belaka, akan tetapi didalamnya banyak terdapat kepentingan – kepentingan tersembunyi yang dibalut dengan permainan ataupun strategi bahasa, sehingga masyarakat bisa menerimanya secara tidak disadari. Maka dari itu, masyarakat diharapkan tidak langsung menyerap apa yang terdapat dalam suatu berita secara langsung, perlu dilakukan penyaringan terlebih dahulu agar informasi yang terdapat didalamnya bisa diserap dengan maksimal, dan juga masyarakat tidak akan mudah untuk dikendalikan oleh media maupun orang – orang yang memiliki kepentingan lewat media tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala, Siti Karlinah. 2009. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Dalam Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.* Yogyakarta: PT. *LKiS* Printing Cemerlang.

Haryadi, Rohmat. 2009. *Chandra-Bibit: Membongkar Perseteruan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.* Jakarta: PT. Mizan Publika.

Hikmat, Mahi M. 2011. *Komunikasi Politik Teori dan Praktik.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Santoso, Listiyono, dkk. 2003. *Epistemologi Kiri.* Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sumadiria, AS Haris. 2008. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Riyanto, E Armada. 2011. *Berfilsafat Politik.* Yogyakarta: Kanisius.

Wolff, Jonathan. 2013. *Pengantar Filsafat Politik.* Bandung: CV Nusa Media.

Zamroni, Mohammad. 2009. *Filsafat Komunikasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Karya Ilmiah:

Ardianto, Elvinaro. 2012. *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Harian Pikiran Rakyat Dan Harian Kompas Sebagai Public Relations Politik Dalam Membentuk Branding Reputation Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).* Universitas Padjadjaran.

Astuti, Tia Agnes. 2011. *Analisis Wacana Kritis Van Dijk Terhadap Berita "Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft" di Majalah Pantau.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Watutun, Monika. 2013. *Analisis Berita Politik Tentang Gubernur Nusa Tenggara Timur Di Media Massa Cetak (Studi Analisis Wacana Kritis Model Teun A.Van Dijk Pada Headline Pemberitaan Di Surat Kabar Harian Pos Kupang Dan Harian Pagi Timor Express Dalam Perspektif Public Relations Politik Periode Agustus – September 2012).* Universitas Padjadjaran.

Sumber Lain:

Berita *"Giliran PDIP Serang KPK",* Harian Pikiran Rakyat, Edisi 23 Januari 2015.

Berita Cicak vs Buaya, Majalah Tempo, Edisi Juli 2009

Berita *"Gubernur:Pikiran Rakyat, Koran Nasional Berpusat di Bandung"* di situs resmi Pemerintah Jawa Barat yang diakses pada tanggal 9 April 2015 pukul 17:21 WIB. http://jabarprov.go.id/index.php/news/8528/Gubernur_Pikiran_Rakyat_Koran_Nasional_Berpusat_di_Bandung